

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**



Diajukan Oleh:

**MIRA MARCELINA
NIM. 01043120047**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

S
352.107

MM
P
2008

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

R. 16734
i. 1706



Diajukan Oleh:

**MIRA MARCELINA
NIM. 01043120047**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : MIRA MARCELINA
NIM : 01043120047
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 29 April 2008

Ketua :


Dr. Azwardi, M.Si

NIP. 132050494

Tanggal 29 April 2008

Anggota :


Drs. Nazeli Adnan, M.Si

NIP. 131801648

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

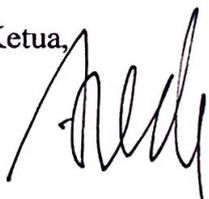
NAMA : MIRA MARCELINA
NIM : 01043120047
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 12 Mei 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 12 Mei 2008

Ketua,



Dr. Azwardi, M.Si
NIP. 132050494

Anggota,



Drs. Nazeli Adnan, M.Si
NIP. 131801648

Anggota,



Drs. Harunnurrasyid, M.Com
NIP. 131844026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Taufiq Marwa, M.Si
NIP. 132050493

MOTTO

“ Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat.”

(H.R. Ar-rabii’)

Kupersembahkan Kepada:

- **ALLAH SWT**
- **AYAH dan IBU tercinta**
- **Kakak dan kedua Adikku**
- **Seorang Idut**
- **aLmamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk dapat meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang**. Skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Penutup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan keuangan daerah dilihat dari derajat desentralisasi fiskal, namun bila dilihat dari derajat kemandirian daerah pengaruhnya negatif.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kelemahan karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritikan yang membangun bagi penulisan di masa yang akan datang.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis,

Mira Marcelina

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wa syukurilah... Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT karena telah diberikan rahmat, petunjuk, kekuatan, kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini..

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Badia Perizade, MBA**, rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak **Dr. Syamsurijal AK** selaku Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus sebagai salah satu dosen penguji proposal skripsi. Terima kasih atas saran dan kritikan yang telah diberikan pada saat ujian proposal skripsi.
3. Bapak **Dr. Taufiq Marwa, M.Si** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas saran dan bantuan yang telah diberikan.
4. Bapak **Dr. Didik Susetyo, M.Si** selaku pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan sejak awal penulis menginjak bangku kuliah hingga penyusunan skripsi.
5. Bapak **Dr. Azwardi, M.Si** selaku pembimbing skripsi I. Terima kasih atas bimbingan dan pengetahuan yang telah Bapak berikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Drs. Nazeli Adnan, M.Si** selaku pembimbing skripsi II sekaligus sekretaris jurusan EP. Terima kasih atas saran, kritikan, bantuan, waktu yang telah bapak berikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak **Drs. Harunnurrasyid, M.Com** selaku dosen penguji pada ujian komprehensif. Terima Kasih atas pertanyaan, saran, masukan yang telah Bapak berikan kepada penulis.
8. Ayahku **M. Nasir Zainal** dan Ibuku **Darwini**. Terima kasih atas semua doa, dukungan dan pengorbanan yang selama ini telah ayah dan ibu berikan. Maaf... baru ini yang bisa penulis persembahkan buat ayah dan ibu..
9. Saudara – Saudaraku **Kak Yayan, Dek Haris** dan **Dek Vani** yang telah memberikan semangat dan keceriaan yang luar biasa kepada penulis....

10. Keluarga Besarku yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materi hingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya...
11. Seseorang yang telah memberikan warna yang berbeda pada kehidupanKu **the special one 'idutnya Bakmi... *You are everything, and everything is you...*** terima kasih untuk hari kemarin, untuk hari ini, dan untuk hari esok...
12. Sahabat – sahabatku, **RaniSaFitsiLA, UyaKrisNa, NoyikSesviaNa, GiTaLoreNA, YuuLia, raHmaFadiLLa, InTAnSinaga, LamTiur, HiLdaMeiLianti, MayanCitra...** Terima kasih untuk persahabatan yang indah... Keep our friendship.. !!!
13. Sahabat – sahabatku, **YoghiDwiJaya, AgungKurniawan, aLL Palas Ranger(putra-putri), aLL Big Family.....**
14. Teman – Teman seperjuanganKu mulai dari sidang proposal **rani,noyik,wita,dini...** Teman seperjuangan konsultasi skripsi **Kak Samsiarni,Tobo,Asti,Vina,Gefin....** Teman seperjuangan ujian komprehensif **noyik,gita,uni,tobo,cici....** Keep our spirit high...!!!!
15. Teman – Teman di jurusan **Ekonomi Pembangunan angkatan 2004** Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, suatu kebahagiaan dapat melewati masa kuliahKu bersama kalian...
16. Kakak Tingkat dan Adik Tingkat, **EP 01, EP 02, EP 03, EP 05, EP 06, EP 07....** Tetap semangat yow... Hidup EP..!!!
17. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Staf Pegawai Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Staf Pegawai di lingkungan BAPPEDA Kota Palembang, Staf Pegawai di Lingkungan Kantor Walikota Palembang, serta Staf Pegawai di BPS Sumatera Selatan.

Penulis,

Mira Marcelina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SEWUJAYA N. DAFTAR: 380548 TANGGAL : 03 JUN 2008	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	9
2.1.1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2. Konsep Keuangan Daerah	11
2.1.3. Hubungan PAD dengan PDRB	16
2.1.4. Konsep Desentralisasi Fiskal	17
2.2. Penelitian Terdahulu	21
2.3. Kerangka Pikir	23
2.4. Hipotesis	23

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian	24
3.2. Jenis dan Sumber Data	24
3.3. Teknik Analisis	25
3.4. Model Analisis	26
3.5. Batasan Operasional Variabel	29

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Perekonomian Kota Palembang	31
4.1.1. Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto	31
4.2. Deskripsi Variabel Penelitian	39
4.2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	39
4.2.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41
4.2.3. Perkembangan Subsidi dan Bantuan Dana	43
4.2.4. Perkembangan Penerimaan Daerah	45
4.2.5. Perkembangan Belanja Daerah	47
4.3. Pembahasan	49
4.3.1. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang	49
4.3.2 Hasil Perhitungan dan Pembahasan	55
4.3.2.1.Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang	55
4.3.2.2.Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang	64
4.3.2.3.Perbedaan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang sebelum dan setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	67

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 1996 – 2006	4
Tabel 1.2.	PDRB Kota Palembang Tahun 1996 – 2006	6
Tabel 4.1.	PDRB Kota Palembang atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha	32
Tabel 4.2.	PDRB Kota Palembang atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha	34
Tabel 4.3.	Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Per Sektor (Dengan Migas)	37
Tabel 4.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1996 – 2006	40
Tabel 4.5.	Perkembangan Komponen PAD Kota Palembang Tahun 1996 – 2006	43
Tabel 4.6.	Perkembangan Subsidi dan Bantuan Dana Kota Palembang	44
Tabel 4.7.	Perkembangan Total Penerimaan Daerah (TPD) Kota Palembang Tahun 1996 – 2006	46
Tabel 4.8.	Perkembangan Total Belanja Daerah (TBD) Kota Palembang Tahun 1996 - 2006	48
Tabel 4.9.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), serta Subsidi dan Bantuan Dana (SBD) Kota Palembang 1996 – 2006	50

Tabel 4.10. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang

 Tahun 1996 – 200651

Tabel 4.11. Perkembangan Derajat Kemandirian Daerah Kota Palembang

 Tahun 1996 – 200653

Tabel 4.12. Analisis Uji t-tabel57

Tabel 4.13. Analisis Uji F-tabel58

Tabel 4.14. Pengujian Mulikolinieritas59

Tabel 4.15. Analisis Uji t-tabel61

Tabel 4.16. Analisis Uji F-tabel62

Tabel 4.17. Pengujian Mulikolinieritas62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Hubungan Fungsi Pusat Daerah	12
Gambar 2.2.	Alur Pikir	23
Gambar 4.1.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	33
Gambar 4.2.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2000)	35
Gambar 4.3.	Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku (Dengan Migas) Tahun 2006	38
Gambar 4.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang	40
Gambar 4.5	Perkembangan Derajat Kemandirian Daerah Kota Palembang Tahun 1996 – 2006	54

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan keuangan daerah Kota Palembang, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi tercermin dari pertumbuhan PDRB, sedangkan kemampuan keuangan daerah diukur dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Derajat Kemandirian Daerah (DKD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dengan koefisien 0,770. Hal ini berarti setiap tambahan 1 persen variabel pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,770 persen variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Namun bila dilihat dari Derajat Kemandirian daerah, variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Derajat Kemandirian Daerah (DKD).

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Kemampuan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat Kemandirian Daerah

ABSTRACT

This research has purpose to analyze the influence of economic growth to region financial ability of Palembang. In which economic growth reflected by PDRB growth and region financial ability measured by fiscal decentralization degree and regional autonomous degree.

The result of this research shown that economic growth variable had positive and significant influence to fiscal decentralization degree with coefficient 0,770. It means, if economic growth variable added 1 percent, it increased 0,770 percent fiscal decentralization degree variable. Otherwise economic growth variable had no significant influence to region autonomous degree.

Key word : Economic Growth, Region Financial Ability, Fiscal Decentralization Degree, Region Autonomous Degree

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif (Adi; 2006 : 2).

Ditekankan juga bahwa titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II) dengan dasar pertimbangan : *pertama*, dari dimensi politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. *Kedua*, dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. *Ketiga*, Dati II adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya (Kuncoro; 1997 : 407).

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam hal pengambilan keputusan dan

pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah yang selanjutnya akan menjadi tanggung jawab kepada masyarakat daerah yang bersangkutan secara transparan (Boex; 2001 : 3).

Desentralisasi fiskal menurut Boex (2001 : 10) terdiri atas ; *pertama*, penerimaan (receipts) yang berhubungan dengan sumber – sumber penerimaan daerah termasuk pajak dan bukan pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah; *kedua*, pengeluaran (expenditures) yang berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab atas segala pengeluaran untuk masing – masing tingkatan pemerintahan; *ketiga*, pinjaman dan hutang (loans) yang berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sehingga menyebabkan terjadinya defisit daerah; *keempat*, transfer yang berhubungan dengan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Penerimaan daerah sebagai pokok utama dari desentralisasi fiskal tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan dana dalam jumlah besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan usaha untuk mengimbangi kegiatan dari pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing – masing daerah. Disamping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengurangan beban pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah (Rasyid dalam Hidayat; 2006 : 3).

Titik sentral dari pelaksanaan otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam hal keuangan. Keuangan ini diperlukan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk melayani kepentingan dan kebutuhan publik (Sondakh; 2003 : 309).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan subsidi atau bantuan dana.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi akan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu PAD diharapkan akan menjadi sumber penerimaan terbesar dari seluruh sumber penerimaan daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga upaya untuk menciptakan kemampuan keuangan daerah yang sesungguhnya tidak ada pilihan lain bagi pemerintah daerah untuk terus menggali dan mengembangkan penerimaan PAD tersebut.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.

Tabel 1.1
Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang Tahun 1996-2006
(rupiah)

TAHUN	KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				TOTAL PAD
	Pajak Daerah	RETRIBUSI DAERAH	LABA BUMD	PENDAPATAN LAIN - LAIN	
1996	7,488,548,357	4,776,622,188	114,187,770	1,658,000,560	14,037,358,875
1997	8,043,109,346	6,548,675,552	278,973,728	1,727,851,950	16,598,610,576
1998	8,550,450,017	7,085,829,291	207,242,740	392,056,949	16,235,578,997
1999	9,537,954,726	5,808,516,035	145,679,736	3,454,365,079	18,946,515,576
2000	13,707,288,609	8,326,314,068	291,370,764	583,635,160	22,908,608,601
2001	17,601,879,447	15,453,716,748	678,418,363	3,225,401,969	36,959,416,527
2002	22,602,772,720	23,277,971,855	903,810,092	7,251,875,903	54,036,430,570
2003	26,036,154,076	25,418,742,848	1,077,405,243	14,619,514,839	67,151,817,006
2004	31,903,200,332	28,348,128,326	660,072,969	6,560,943,386	67,472,345,013
2005	37,862,702,142	39,904,051,546	2,820,766,465	5,512,585,294	86,100,105,448
2006	40,652,365,155	37,016,633,853	821,389,463	11,185,658,427	89,676,046,899

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Kemampuan PAD suatu daerah tergantung dari struktur penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diambil dari sektor – sektor ekonomi daerah. Besarnya persentase sumbangan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) akan menjadi ukuran desentralisasi fiskal di tingkat kabupaten/ kota (Kuncoro; 2004 : 79), sedangkan besarnya persentase sumbangan PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) akan menjadi ukuran kemandirian daerah (Halim dalam Landiyanto; 2005 : 8).

Kota Palembang merupakan salah satu Daerah Otonom yang berada dalam wilayah propinsi Sumatera Selatan yang dikategorikan memiliki tingkat penerimaan daerah (yang berasal dari pos pendapatan asli daerah) yang terbesar diantara kabupaten/kota lainnya yang terdapat di propinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, dengan besarnya tingkat penerimaan daerah kota Palembang belum serta merta menjadikan kota Palembang dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah, karena untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur melalui derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian daerah yang dimiliki Kota Palembang.

Mengukur seberapa besar keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kota Palembang tidak cukup hanya dilakukan dengan melihat data statistik keuangan daerah, tetapi juga dapat diukur dengan menggunakan indikator – indikator lain. Keberhasilan pelaksanaan otonomi di Kota Palembang dapat dilihat dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Dengan kata lain semakin meningkatnya PDRB di suatu daerah, maka akan berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah tersebut.

Tabel 1.2 berikut menunjukkan peningkatan ekonomi Kota Palembang selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kecuali pada tahun 1998 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain pada tahun 1998 ini tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Namun setelah masa *recovery*, pertumbuhan ekonomi kembali membaik dan terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.2
PDRB Kota Palembang Tahun 1996 – 2006
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
1996*	3,131,606	2,847,784
1997*	3,301,103	3,031,876
1998*	2,923,740	2,652,629
1999*	3,483,107	2,762,496
2000	9,930,072	8,041,520
2001	10,330,116	8,376,760
2002	10,895,982	8,919,772
2003	11,488,473	9,506,699
2004	12,226,259	10,263,312
2005	13,088,880	11,152,237
2006	13,998,531	12,090,550

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Keterangan : *) Atas Dasar Harga Konstan 1993

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menambah penerimaan daerah, terutama pendapatan asli daerah (PAD). Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah daerah dapat diukur dengan melihat elastisitas PDRB terhadap penerimaan PAD, yang menunjukkan bahwa persentase perubahan PDRB akan berpengaruh terhadap persentase penerimaan PAD (Saragih dalam Adi; 2006 : 8).

Peningkatan penerimaan PAD akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah.

Peningkatan perekonomian daerah ini akan diiringi dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, sehingga diharapkan kemandirian daerah dapat terwujud dan ketergantungan daerah terhadap pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang.**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah : berapa besar pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan keuangan daerah Kota Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan keuangan daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah pengetahuan penulis dan akademisi lainnya mengenai adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan keuangan daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Teknis

Melalui informasi yang diperoleh dari tulisan ini dapat menjadi masukan bagi penulis – penulis lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan daerah dilihat dari derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian daerah.

3. Manfaat Operasional

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan penetapan kebijakan keuangan daerah, khususnya bagi Pemerintah Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Padang : *Simposium Nasional*.
- Agustini, Triana. 2007. Kausalitas Sumber – Sumber PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral. *Tesis*. PPS Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Aklil, Maulana. 2003. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Tesis*. PPS Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Badan Pusat Statistik. *Palembang dalam Angka 2002-2006*. Sumatera Selatan : BPS
- Bahl, Roy, W., 1999. **Implementation Rules For Fiscal Decentralization**. Published of the World Bank, New York.
- Basri, Yuswar dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Boex, Jameson. 2001. *An introductory overview of intergovernmental fiscal relations*. **Fiscal Policy Training Program**, Atlanta : Georgia State University
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Daud. 2005. Analisis PAD dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Tesis*. PPS Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometrics*. Singapore : Mc Graw- Hill Book. Co.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMD YKPN.
- Hariyadi, Jasagung. 2001. Estimasi Penerimaan dan Belanja Daerah serta Derajat Desentralisasi fiskal Kabupaten Belitung. Palembang. *Tesis*. PPS Universitas Sriwijaya, Palembang.

- Haryanto. 2005. Analisis Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin. *Tesis*. PPS Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Hidayat, Dian. 2006. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Kurniawan, Budi Febriyanto. 2005. Analisis Kausalitas PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Landiyanto, Erlangga. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *CURES Working Paper* No 05/01 January 2005.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development dan Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal : 1- 21.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik Edisi* . Yogyakarta : BPFE.
- Manurung, Joni dkk. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nachrowi, Jalal dan Hardius Usman. 2005. *Penggunaan Tehnik Ekonometrika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Pyndick, Roberts dan Daniel Rubinfeld. 1998. *Econometrics Models and Economic Forecast*. Singapore : Mc Graw – Hill. co
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Shah, Anwar, editor (2003), *Ensuring Accountability When There Is No Bottom Line*, Vol. 1 of *Handbook on Public Sector Performance Reviews*. Washington D.C.: The World Bank.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Diambil pada tanggal 11 januari 2008 dari [http:// www.djkpd.go.id](http://www.djkpd.go.id)

Sondakh, Lucky. 2003. *Globalisasi dan desentralisasi perspektif ekonomi lokal*. Jakarta : Penerbit FE UI.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi pertama*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Susanti, Hera dkk. 2000. *Indikator – Indikator Makroekonomi*. Jakarta : Penerbit LPFE UI.

Trihendradi, Cornelius. 2005. *Step by Step SPSS 13 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 2004. Bandung : Fokusmedia.

UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Bandung : Fokusmedia.

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004 . Bandung : Fokusmedia.

UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004 . Bandung : Fokusmedia.

Wirdiansyah, Adi. 2006, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Muba dalam era otonomi daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.